

Masa Pendudukan Jepang di Indonesia

1. Situasi Indonesia menjelang kedatangan Jepang

Pada tahun 1936, Sutarjo Kartohadikusumo, ketua Persatuan Pegawai Bestuur (Pamong Praja) bumi putera, mengajukan surat permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda yang dikenal dengan Petisi Sutarjo. Isi petisi tersebut ialah meminta diadakannya konferensi antara wakil-wakil Indonesia dan Belanda untuk menyusun rencana pemerintahan sendiri bagi bangsa Indonesia meskipun masih dalam lingkungan kekuasaan Belanda.

Pelaksanaan pemerintahan dijalankan dalam waktu 10 tahun atau sesuai dengan hasil konferensi. Pada tahun berikutnya, Gabungan Politik Indonesia (GAPI) merumuskan usulan dalam slogan Indonesia Berparlemen. Kedua usulan tersebut ternyata ditolak oleh pemerintah Belanda. Setelah melalui perjuangan yang sangat gigih, akhirnya pemerintah kolonial Belanda berjanji akan membentuk komisi yang bertugas mengumpulkan bahan-bahan tentang perubahan ketatanegaraan yang diinginkan oleh bangsa Indonesia. Pada tanggal 14 September 1940 dibentuk *Commissie tot Berstudeering van Staatsrechtelijke Hervormingen* (Komisi untuk menyelidiki dan mempelajari perubahan-perubahan ketatanegaraan). Komisi ini dikenal dengan nama **Komisi Visman**, diketuai oleh **Dr. F.H. Visman**. Pembentukan komisi ini tidak mendapat sambutan dari anggota-anggota Volksraad, bahkan anggota GAPI terang-terangan menyatakan tidak setuju. Ketidaksetujuan dikalangan kaum pergerakan disebabkan berdasarkan pengalaman, komisi-komisi yang dibentuk Belanda (contoh, komisi sejenis pada tahun 1918) tidak akan membawa hasil yang menguntungkan bagi Indonesia.

Pada tanggal 8 Maret 1942, Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda Letnan Jenderal H. Ter Poorten, atas nama Angkatan Perang Sekutu di Indonesia, menyerah tanpa syarat kepada pimpinan tentara Jepang Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Penyerahan tanpa syarat tersebut ditandai dengan persetujuan Kalijati yang diadakan di Subang, Jawa Barat. Isi persetujuan tersebut adalah penyerahan hak atas tanah jajahan Belanda di Indonesia kepada pemerintahan pendudukan Jepang.

2. Propaganda Jepang

Meskipun kedatangannya, seperti juga Belanda, adalah untuk tujuan menjajah, Jepang diterima dan disambut lebih baik oleh bangsa Indonesia. Berikut alasan yang melatarbelakangi perbedaan sikap tersebut.

- a. Jepang menyatakan bahwa kedatangannya di Indonesia tidak untuk menjajah, bahkan bermaksud untuk membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu penjajahan Belanda.
- b. Jepang melakukan propaganda melalui Gerakan 3A (Jepang cahaya Asia, Jepang pelindung Asia, dan Jepang pemimpin Asia).
- c. Jepang mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia yang datang dengan maksud hendak membebaskan rakyat Indonesia.
- d. Adanya semboyan *Hakoo Ichiu*

Pemimpin-pemimpin pergerakan pun mau bekerja sama dengan Jepang alasannya adalahsaat itu Jepang sedang dalam keadaan kuat, sedangkan Indonesia sedang dalam keadaan lemah. Untuk itu, Indonesia membutuhkan bantuan Jepang agar dapat mencapai cita-cita.

3. Kebijakan Jepang dalam bidang politik dan pemerintahan

Pendudukan Jepang di Indonesia dibagi dalam tiga wilayah.

- a. Pemerintahan Militer Angkatan Darat ke-25 (Tentara Keduapuluhlima), wilayah kekuasaannya meliputi Sumatra dengan pusat pemerintahan di Bukittinggi.
- b. Pemerintahan Militer Angkatan Darat ke-16 (Tentara Keenambelas), wilayah kekuasaannya meliputi Jawa dan Madura dengan pusat pemerintahan di Jakarta.
- c. Pemerintahan Militer Angkatan Laut II (Armada Selatan Kedua), wilayah kekuasaannya meliputi Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusat pemerintahan di Makassar.

Pemerintahan pendudukan militer di Jawa sifatnya hanya sementara, sesuai dengan *Osamu Seirei* Nomor 1 Pasal 1 yang dikeluarkan tanggal 7 Maret 1942 oleh Panglima Tentara Keenambelas. Undang-undang tersebut menjadi pokok dari peraturan-peraturan ketatanegaraan pada masa pendudukan Jepang. Undang-undang tersebut juga mengisyaratkan bahwa pemerintahan pendudukan Jepang berkeinginan untuk terus menggunakan aparat pemerintah sipil yang lama beserta para pegawainya. Hal ini dimaksudkan agar pemerintahan dapat terus berjalan dan kekacauan dapat dicegah. Adapun pimpinan pusat tetap dipegang tentara Jepang. Susunan pemerintahan militer Jepang sebagai berikut.

- a. Gunshireikan (panglima tentara), kemudian disebut Saiko Shikikan (panglima tertinggi), merupakan pucuk pimpinan.
- b. Gunseikan (kepala pemerintahan militer), dirangkap oleh kepala staf tentara. Gunshireikan bertugas menetapkan peraturan yang dikeluarkan oleh Gunseikan. Peraturan itu disebut *Osamu Kanrei*. Peraturan-peraturan tersebut diumumkan dalam *Kan Po* (berita pemerintahan), sebuah penerbitan resmi yang dikeluarkan oleh Gunseikanbu. Gunseikanbu adalah staf pemerintahan militer pusat yang terdiri dari lima bu (departemen): Sumabu (departemen urusan umum), Zaimubu (departemen keuangan), Sangyobu (departemen perusahaan, industri, dan kerajinan), Kotsubu (departemen lalu lintas), dan Shihobu (departemen kehakiman). Koordinator pemerintahan militer setempat disebut *gunseibu*. Pusat-pusat koordinator militer tersebut berada di Bandung (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), dan Surabaya (Jawa Timur).

Akan tetapi, usaha untuk membentuk pemerintahan setempat ternyata tidak berjalan lancar. Jepang masih sangat kekurangan tenaga pemerintah. Jepang telah berusaha mengirimkan tenaga yang dibutuhkan, namun tidak sampai ke tujuan karena kapal yang mengangkut tenaga-tenaga pemerintahan tersebut tenggelam setelah terkena serangan torpedo Sekutu. Akhirnya, Jepang terpaksa mengangkat pegawai-pegawai dari bangsa Indonesia asli. Hal ini memberi keuntungan bagi pihak Indonesia karena memperoleh pengalaman dalam bidang pemerintahan.

Menurut Undang-Undang No. 27 tentang Perubahan Tata Pemerintahan Daerah, seluruh Pulau Jawa dan Madura (kecuali kedua *koci*, Surakarta dan Yogyakarta) dibagi atas enam wilayah pemerintahan.

- a. *Syu* (karesidenan), dipimpin oleh seorang *syuco*.
- b. *Syi* (kotapraja), dipimpin oleh seorang *syico*.

- c. *Ken* (kabupaten), dipimpin oleh seorang *kenco*.
- d. *Gun* (kawedanan atau distrik), dipimpin oleh seorang *gunco*.
- e. *Son* (kecamatan), dipimpin oleh seorang *sonco*.
- f. *Ku* (kelurahan atau desa), dipimpin oleh seorang *kuco*.

4. Kebijakan Jepang dalam bidang ekonomi dan sosial

Dalam bidang ekonomi, Jepang membuat kebijakan-kebijakan yang pada intinya terpusat pada tujuan mengumpulkan bahan mentah untuk industri perang. Ada dua tahap perencanaan untuk mewujudkan tujuan tersebut, yaitu tahap penguasaan dan tahap menyusun kembali struktur. Pada tahap penguasaan, Jepang mengambil alih pabrik-pabrik gula milik Belanda untuk dikelola oleh pihak swasta Jepang, misalnya, Meiji Seiyō Kaisha dan Okinawa Seilo Kaisha. Adapun dalam tahap restrukturisasi (menyusun kembali struktur), Jepang membuat kebijakan-kebijakan berikut.

- a. Sistem autarki, yakni rakyat dan pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan sendiri untuk menunjang kepentingan perang Jepang.
- b. Sistem *tonarigumi*, yakni dibentuk organisasi rukun tetangga yang terdiri atas 10 – 20 KK untuk mengumpulkan setoran kepada Jepang.
- c. Jepang memonopoli hasil perkebunan berdasarkan UU No. 22 Tahun 1942 yang dikeluarkan oleh Gunseikan.
- d. Adanya pengerahan tenaga untuk kebutuhan perang. Sebagai usaha penunjang kebutuhan perang, Jepang memberlakukan mobilitas sosial yang meliputi:
 - a. pelaksanaan *kinrohoshi* atau latihan kerja paksa,
 - b. pelaksanaan romusa atau kerja paksa tanpa bayar selamanya, dan
 - c. pembentukan *tonarigumi* atau organisasi rukun tangga.

Untuk membangun mentalitas, ditanamkan *seishin* atau semangat serta *bushido* atau jalan ksatria yang berani mati, rela berkorban, siap menghadapi bahaya, dan menjunjung tinggi keperwiraan. Bentuk-bentuk organisasi kemiliteran yang dibentuk Jepang sebagai berikut.

- a. Seinendan, yaitu barisan pemuda yang berumur 14 – 22 tahun.
- c. Iosyi Seinendan, yaitu barisan cadangan atau seinendan putri.
- c. Bakutai, yaitu pasukan berani mati.
- d. Keibodan, yaitu barisan bantu polisi yang anggotanya berusia 23 – 35 tahun. Barisan ini di Sumatra disebut Bogodan dan di Kalimantan disebut Borneo Konon Hokokudan.
- e. Hisbullah, yaitu barisan semimiliter untuk orang Islam.
- f. Heiho, yaitu pembantu prajurit Jepang yang anggotanya berusia 18– 25 tahun.
- g. Jawa Sentotai, yaitu barisan benteng perjuangan Jawa.
- h. Suisyintai, yaitu barisan pelopor.
- i. Peta atau Pembela Tanah Air, yaitu tentara daerah yang dibentuk oleh Kumakichi Harada berdasarkan Osamu Serei No. 44 tanggal 23 Oktober 1943.
- j. Gokutokai, yaitu korps pelajar yang dibentuk pada bulan Desember 1944.
- k. Fujinkai, yaitu himpunan wanita yang dibentuk pada tanggal 23 Agustus 1943.

5. Perlawanan rakyat terhadap pendudukan Jepang

Kaum pergerakan dan kaum intelektual nasional akhirnya sadar bahwa Jepang ternyata jauh lebih berbahaya bagi bangsa Indonesia karena kekejaman dan penindasannya terhadap rakyat. Sejak awal tahun 1944, rasa simpati terhadap Jepang mulai hilang dan berganti dengan kebencian. Muncullah gerakan-gerakan perlawanan terhadap Jepang, seperti Gerakan 3A, Putera, dan Peta. Salah satu contoh pemberontakan bangsa Indonesia yang terbesar terhadap Jepang adalah pemberontakan Peta Blitar tanggal 4 Februari 1945. Calon perwira Peta mendapat latihan pertama kali di Bogor. Setelah mendapatkan latihan-latihan tersebut, tentara Peta ditempatkan di *daidan-daidan* (batalyon) yang tersebar di Jawa, Madura, dan Bali. Semuanya berjumlah 66 *daidan*. Dalam perkembangannya, banyak anggota Peta yang merasa kecewa terhadap pemerintah pendudukan Jepang. Mulai tahun 1944 terjadi pemberontakan-pemberontakan, yang terbesar adalah pemberontakan Peta Blitar, Jawa Timur, pada tanggal 14 Februari 1945 yang diikuti oleh sekitar separuh dari seluruh anggota *daidan*. Sayangnya, pemberontakan yang dipimpin oleh Supriyadi dan Muradi tersebut dapat ditumpas Jepang. Peristiwa ini diabadikan sebagai hari Peta.

Soal Latihan

1. Sebutkan pembagian tiga wilayah militer masa pendudukan Jepang di Indonesia!
2. Jelaskan peran kaum nasionalis dan pergerakan pada masa pendudukan Jepang!
3. Mengapa Jepang membentuk Jawa Hokokai?
4. Jelaskan perbedaan Heiho dan Tentara PETA!
5. Apa tujuan Jepang membentuk Putera dan apa manfaatnya bagi Indonesia?